

## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti berfokus pada empat elemen analisis wacana digital Rodney H. Jones, yaitu teks, konteks, tindakan dan interaksi, serta ideologi dan kekuasaan. Maka, peneliti menemukan bahwa konten reels @mastercobuzier mengenai program MBG tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian opini personal, melainkan sebagai praktik diskursif yang membangun wacana moral dan relasi kuasa simbolik di ruang digital.

Pada elemen teks, kekerasan verbal ditemukan dalam teks lisan pada video reels dan teks tertulis pada caption Instagram. Dalam teks lisan, kekerasan verbal muncul melalui praktik *insult and name calling*, *trolling*, dan *threats* yang membingkai kritik terhadap program MBG sebagai sikap tidak bersyukur dan tidak bermoral. Sementara itu, pada teks tertulis dalam takarir, kekerasan verbal bekerja secara implisit melalui praktik *moral judgment* yang membangun dikotomi moral antara pihak yang bersyukur dan pihak yang mengeluh, sehingga penilaian audiens lebih didasarkan pada norma moral dibandingkan konteks kebijakan publik.

Selain itu, kekerasan non verbal ditemukan melalui unsur visual dan perilaku komunikasi dalam video, seperti intonasi suara yang tinggi dan menekan, ekspresi wajah yang menunjukkan kemarahan atau peremehan, serta gesture tubuh yang agresif. Penggunaan emoji dalam caption turut memperkuat ekspresi emosi dan mempertegas sikap dominatif figur publik terhadap audiens.

Pada elemen konteks, posisi Deddy Corbuzier sebagai figur publik dengan pengaruh besar di media sosial memberikan legitimasi terhadap pesan yang disampaikan. Namun, kedekatannya dengan aktor dan institusi pemerintah memengaruhi cara audiens membaca wacana tersebut, terutama ketika narasi kepedulian yang dibangun tidak sepenuhnya sejalan dengan pengalaman masyarakat terkait kualitas layanan publik. Kondisi ini memicu munculnya kritik dan resistensi sebagai bentuk negosiasi makna di ruang digital.

Pada elemen tindakan dan interaksi, kekerasan verbal dan non verbal juga ditemukan dalam interaksi audiens di kolom komentar. Kekerasan non verbal tampak melalui penggunaan emoji, GIF, penulisan huruf kapital, dan tanda baca berlebihan yang menandai kemarahan atau ejekan. Sementara itu, kekerasan verbal muncul melalui praktik *insult and name calling*, *trolling*, dan *dogpiling* sebagai bentuk respons kolektif audiens untuk menantang klaim moral dan otoritas figur publik.

Pada aspek ideologi dan kekuasaan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan kekerasan verbal dan non verbal pada konten reels berfungsi sebagai cara untuk menegaskan nilai syukur dan disiplin sebagai standar moral yang dianggap paling benar. Praktik ini memperlihatkan pola populisme elitis, di mana figur publik memposisikan diri sebagai pihak yang lebih tahu dan lebih layak untuk menegur audiens, khususnya kelompok yang dikonstruksikan sebagai penerima bantuan. Di dalamnya, terdapat wacana kelas yang bekerja secara implisit, terlihat dari bagaimana kelompok penerima bantuan digambarkan sebagai kelas bawah yang “tidak bersyukur” dan layak dikoreksi secara verbal.

## **5.2 Saran**

Berikut terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi para pembaca penelitian ini:

### **5.2.1 Saran Akademis**

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan multimodal agar dapat melihat secara lebih menyeluruh bagaimana teks, visual, dan unsur suara bekerja bersama dalam membentuk makna di media sosial. Pendekatan ini penting untuk mengkaji aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini, seperti ekspresi visual, intonasi suara, atau gaya penyajian konten. Selain itu, penelitian lanjutan dapat memperluas fokus pada respons audiens atau membandingkan wacana di berbagai platform media sosial untuk memperkaya kajian komunikasi digital.

### **5.2.2 Saran Praktis**

Bagi influencer atau figur publik, penyampaian kritik di media sosial sebaiknya dilakukan dengan bahasa yang santun, jelas, dan berfokus pada substansi masalah. Penggunaan kata-kata kasar, intonasi marah, atau ekspresi yang terkesan merendahkan sebaiknya dihindari karena dapat memicu konflik dan menutup ruang dialog. Hal ini menjadi penting terutama bagi figur publik yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, karena setiap pernyataan yang disampaikan dapat memengaruhi persepsi publik secara luas.